

BAB V

PENUTUP

Bab ini akan menyajikan uraian ulang tentang pembahasan sebelumnya, disertai dengan kesimpulan penelitian mengenai konflik geothermal Wae Sano dalam perspektif politik pengakuan Axel Honneth. Penulis juga akan memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, untuk hasil yang lebih baik. Pembahasan mengaitkan data dari bab sebelumnya yang menganalisis konflik melalui kerangka politik pengakuan, dengan fokus pada peran pengakuan sosial dalam meredakan ketegangan antara pihak-pihak terkait.

5.1. Uraian Ulang

Axel honneth merupakan seorang filsuf sosial politik Jerman, yang melihat pengakuan sebagai aspek yang paling penting dalam kehidupan individu. Pengakuan merupakan elemen dasar bagi individu untuk melihat dirinya sebagai subjek dalam hubungan intersubjektivitasnya. Bagi Honneth individu akan mengenal dan memahami dirinya secara utuh sebagai suatu “totalitas” atau subjek ketika ia mampu melihat, mengenal, dan memahami dirinya dalam kesadaran orang lain.¹

Honneth selanjutnya melihat bahwa pengakuan yang diberikan orang lain terhadap individu akan memberikan rasa percaya diri bagi individu sebagai subjek, dan relasi ini ada didalam dimensi cinta. Rasa percaya diri yang timbul dari relasi ini akan membantu individu untuk berkembang kearah yang lebih baik dalam relasinya dengan yang lain, individu mampu melihat kesetaraannya dengan yang lain serta mampu berpartisipasi dengan yang lain.²

Dimensi cinta memberikan rasa percaya diri bagi individu dalam relasinya bagi yang lain, namun untuk menjamin kesetaraan dan keadilan dalam relasinya ini dimensi pengakuan

¹ Axel honneth, *The Struggle for Recognition*, *Loc. Cit.*, hlm. 24.

² *Ibid.*, hlm. 106

legal atau *legal recognition* memberikan ruang bagi individu untuk berinteraksi. Dengan adanya hak-hak legal yang diberikan maka itu akan mendukung rasa hormat pada individu sebagai subjek. Karena hanya melalui *legal recognition* ini individu mampu melihat dirinya sebagai subjek yang sederajat dengan yang lain dalam pembentukan kehendak kolektif dan keputusan bersama.³

Selanjutnya Honneth melihat bahwa wilayah sosial (solidaritas) adalah tempat yang memungkinkan bagi individu untuk menemukan rasa harga dirinya sebagai subjek dalam masyarakat. Rasa percaya diri ini terbentuk ketika individu mampu melihat dan menilai secara positif kemampuan serta prestasinya sebagai subjek dan juga penghargaan yang diberikan orang lain atas prestasi tersebut. Wilayah sosial adalah tempat bagi individu untuk berkontribusi bagi masyarakat (dalam nilai kolektif), pun sebaliknya wilayah sosial adalah tempat bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam pembentukan rasa harga diri individu sebagai subjek dalam relasinya dengan yang lain.⁴

Bagi Honneth, *misrecognition* dan *disrespect* adalah penghalang bagi individu untuk menemukan jati dirinya sebagai subjek. Juga dalam dimensi hak dan solidaritas *misrecognition* dan *disrespect* adalah patologi sosial yang memberikan penghinaan dan ketidakadilan bagi subjek yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketimpangan dan konflik sosial.⁵

Konflik geothermal Wae Sano adalah salah satu contoh kasus yang berpotensi untuk menimbulkan konflik sosial yang lebih luas, karena adanya *misrecognition* dan *disrespect* yang dilakukan oleh pihak yang satu terhadap pihak yang lain. Sebagian masyarakat menolak

³ Otto Gusti Madung, *Op. Cit.*, hlm. 4.

⁴ *Ibid.*, hlm. 4.

⁵ Axel honneth, *The Struggle for Recognition*, *Loc. Cit.*, hlm. 131.

proyek ini, karena mereka merasa ada ketimpangan dan ketidakadilan yang dilakukan pihak pemerintah bersama pengelola PT. Geo Dipa Energi terhadap hak-hak mereka.⁶

Honneth melihat ketimpangan sosial terhadap individu atau kelompok disebabkan oleh absennya pengakuan, sehingga memberikan ruang bagi penindasan dan ketidakadilan. Honneth menegaskan bahwa relasi antar subjek-subjek terjadi hanya didalam pengakuan utuh yang meliputi tiga dimensi, cinta, hak, dan solidaritas. Pengakuan memungkinkan adanya relasi ini dalam pengakuan satu sama lain sebagai subjek. *Misrecognition* dan *disrespect* yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat Wae Sano bagi honneth adalah relasi subjek-objek, karena adanya pengakuan yang tidak utuh bahkan penolakan. Relasi subjek-objek ini dapat melahirkan ketidakadilan, penindasan, dan diskriminasi yang pada akhirnya berpotensi untuk melahirkan konflik yang lebih besar.⁷

Oleh karena itu menurut pemikiran Honneth, dalam konflik geothermal Wae Sano ini sangatlah penting bagi pemerintah untuk melihat dan meninjau kembali segala keputusan-keputusan yang telah ditetapkan, segala keputusan-keputusan yang diambil haruslah berpihak pada semua pihak, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Semua keputusan haruslah meliputi tiga dimensi pengakuan agar dapat memberikan rasa puas bagi individu dan kelompok.⁸

Dengan adanya pengakuan utuh yang diberikan pemerintah maka masyarakat akan turut berpartisipasi dalam proses pembangunan ini, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan semua kelompok-kelompok dalam masyarakat merasa puas karena hak-hak mereka diberikan (diakui) oleh pemerintah, dengan demikian mereka tidak lagi melihat diri mereka sebagai objek, melainkan sebagai subjek yang utuh.⁹

⁶ Rivaldus Agung, *Op. Cit.*, hlm. 2.

⁷ M. Harland Pariyatman, *Op. Cit.*, hlm. 115.

⁸ *Ibid.*, hal. 123.

⁹ *Ibid.*, hal. 123.

5.2. Kesimpulan

Dalam politik pengakuannya, Honneth melihat bahwa pengakuan dari yang lain adalah syarat mutlak bagi individu untuk melihat dirinya sebagai subjek. Didalam pengakuan dari yang lain ini, individu akan menemukan tiga hal yang akan membuatnya menjadi suatu “totalitas” atau subjek, yaitu yang pertama cinta, adalah tempat bagi individu untuk menemukan rasa percaya diri, yang akan membentuknya menjadi subjek yang utuh. Yang kedua hak, adalah tempat bagi individu untuk menemukan rasa hormat dirinya melalui relasi dan hak-hak yang setara dengan yang lain. Dan yang ketiga solidaritas, adalah tempat bagi individu untuk menemukan rasa harga dirinya melalui kontribusi yang diberikannya kepada masyarakat melalui prestasi dan kemampuannya serta penghargaan yang diterimanya dari masyarakat terhadap kontribusinya.¹⁰

Yang menjadi hambatan bagi individu untuk menemukan identitasnya sebagai subjek adalah *misrecognition* dan *disrespect*. Honneth mengartikan *misrecognition* sebagai pengakuan yang tidak tepat atau tidak memadai yang diberikan kepada individu atau kelompok. Sedangkan *disrespect* adalah penolakan atau kegagalan dalam memberikan salah satu atau lebih dari tiga bentuk pengakuan yaitu cinta, hak, dan solidaritas. *Misrecognition* dan *disrespect* adalah akar dari ketidakadilan dan konflik sosial.¹¹

Konflik di Wae Sano muncul karena adanya ketegangan antara pihak-pihak yang merasa terabaikan dalam proses pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (geothermal). Masyarakat lokal, yang sebagian besar bergantung pada sumber daya alam sekitar, merasa hak mereka tidak diakui oleh pemerintah dan perusahaan yang terlibat. Dalam perspektif politik pengakuan Honneth, konflik ini timbul akibat kurangnya pengakuan terhadap identitas dan hak masyarakat lokal, yang merasa tidak dihargai dalam pengambilan

¹⁰ Otto Gusti Madung, *Loc. Cit.*, hlm. 4.

¹¹ Helena E Rea, *Op. Cit.*, hlm. 20.

keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.¹²

Dalam dimensi cinta, konflik ini juga menunjukkan adanya ketegangan dalam hubungan sosial antara masyarakat dan pihak perusahaan serta pemerintah. Masyarakat lokal merasa hubungan mereka dengan alam dan tanah leluhur mereka tidak dipahami atau dihargai oleh pihak luar. Tidak adanya pengakuan atas nilai emosional dan spiritual yang terkandung dalam hubungan mereka dengan alam menyebabkan perasaan tidak dihargai, yang kemudian mengarah pada ketegangan dan ketidakpercayaan antara pihak-pihak terkait.¹³

Dimensi hak dan solidaritas juga merupakan hal yang sangat penting dalam konflik ini, di mana masyarakat lokal menuntut pengakuan atas hak mereka untuk menentukan nasib sendiri (*self-determination*). Masyarakat menginginkan adanya peran aktif dalam pengambilan-keputusan terkait proyek geothermal yang mempengaruhi kehidupan mereka. Solidaritas antar kelompok yang terkena dampak, seperti petani dan masyarakat adat, tercipta dalam upaya bersama untuk memperjuangkan hak mereka. Namun, pengabaian atas hak ini oleh pihak perusahaan dan pemerintah memperburuk ketegangan dan memperpanjang konflik.¹⁴

Dengan adanya pengakuan utuh yang diberikan kepada individu atau kelompok, maka individu atau kelompok tersebut akan menemukan rasa percaya diri, rasa hormat diri dan yang pada akhirnya adalah rasa harga dirinya sebagai subjek akan tetap utuh. Dalam konflik geothermal Wae Sano adalah hal yang sangat penting bagi pemerintah untuk kembali memperhatikan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, serta hak-hak masyarakat terutama yang menolak proyek ini. Dengan adanya pengakuan yang diberikan secara utuh, terutama melalui kebijakan-kebijakan yang diberikan, kebijakan yang memperhatikan dan

¹² M. Harland Pariyatman, *Op. Cit*, hlm. 121.

¹³ *Ibid.*, hlm. 120.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 118.

mempertimbangkan hak-hak dan kepentingan semua pihak, maka pada akhirnya proyek ini dapat berjalan dengan lancar tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat lokal.¹⁵

5.3. Rekomendasi Penelitian Selanjutnya

Setelah meneliti dan mempelajari politik pengakuan Honneth, maka penulis memberikan beberapa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

Politik pengakuan Axel Honneth adalah salah satu gagasan yang sangat penting dan ideal dalam konteks dewasa ini. Politik pengakuan Honneth sangatlah relevan dan bermanfaat bagi konteks NTT sebagai salah satu provinsi yang masih dalam tahap pembangunan, dimana pembangunan-pembangunan infrastruktur sering terkendala oleh faktor kepemilikan lahan, dan tentunya juga berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat, yang merasa diabaikan dalam pembangunan infrastruktur-infrastruktur ini. Disini politik pengakuan Honneth dapat menjadi jembatan untuk memecahkan konflik ini.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi lebih dalam bagaimana politik pengakuan Honneth dapat diterapkan dalam konteks pembangunan infrastruktur di NTT, terutama yang melibatkan masyarakat adat dan hak kepemilikan lahan. Penelitian ini dapat fokus pada kasus-kasus spesifik di mana konflik muncul akibat pengabaian hak masyarakat adat dan mencari solusi melalui penerapan prinsip pengakuan yang lebih luas dan inklusif.

Politik pengakuan Honneth merupakan salah satu bentuk kontribusi filsafat yang sangat berkaitan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat sehari-hari. Politik pengakuan Honneth secara langsung menjelaskan bagaimana individu terbentuk di tengah masyarakat, dan bagaimana juga peran masyarakat atau individu yang lain sangat berpengaruh bagi pertumbuhan dan pembentukan karakter individu sebagai subjek. Dalam konteks konflik

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 123.

geothermal Wae Sano, menurut Honneth, sangatlah penting bagi pemerintah untuk memberikan pengakuan penuh terhadap hak-hak masyarakat lokal, yang meliputi tiga dimensi, cinta yaitu berkaitan dengan relasi antara alam dan masyarakat, hak berkaitan dengan hak-hak legal masyarakat, dan solidaritas berkaitan dengan budaya masyarakat setempat.

Politik pengakuan Honneth, sangat menekankan pengakuan dari yang lain sebagai syarat utama bagi individu untuk menemukan identitasnya sebagai subjek. Pengakuan merupakan syarat bagi adanya keadilan. Bagi Honneth absenya pengakuan dari yang lain terhadap individu merupakan salah satu bentuk *disrespect* yang dapat menyebabkan konflik pada diri individu yang pada akhirnya akan mengarah pada konflik sosial. Dalam penelitian ini, melalui pendekatan filosofis, penulis melihat bahwa absenya pengakuan dan pengakuan yang tidak penuh yang meliputi tiga aspek pengakuan (cinta, hak, dan solidaritas) merupakan penyebab terjadinya konflik geothermal Wae Sano.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat membandingkan efektivitas politik pengakuan Honneth dengan teori-teori atau pendekatan lain dalam penyelesaian konflik, seperti pendekatan rekonsiliasi, pembangunan berkelanjutan, atau teori hak asasi manusia. Kajian perbandingan ini dapat memberikan wawasan lebih luas tentang bagaimana konsep-konsep ini saling melengkapi atau berkonflik dalam konteks sosial yang kompleks.

Melalui rekomendasi-rekomendasi ini, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam memahami dan menyelesaikan konflik-konflik sosial yang terjadi di masyarakat adat, di NTT khususnya konflik geothermal Wae Sano, melalui penerapan politik pengakuan Honneth secara lebih luas dan kontekstual.